



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS GADJAH MADA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ADAM PAMUDJI RAHARDJO
2. Jabatan : KETUA PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI TEKNIK PENGELOLAAN BENCANA ALAM
3. NHK : 1004586

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **7.169.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 450 m2/54 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, WARISAN Rp. 1.500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 477 m2/356 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000.000
3. Tanah Seluas 803 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 803.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 229 m2/80 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 458.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 598 m2/130 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.196.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 356 m2/56 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 712.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **733.800.000**

1. MOTOR, HONDA SUPRA X Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000
2. MOTOR, HONDA ASTREA C 86 Tahun 1988, WARISAN Rp. 800.000
3. MOTOR, HONDA SUPRA X Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
4. MOBIL, TOYOTA KIJANG INOVA Tahun 2004, HASIL SENDIRI



Rp. 100.000.000

5. MOBIL, TOYOTA KIJANG INOVA REBORN Tahun 2016, HASIL
SENDIRI Rp. 250.000.0006. MOBIL, HONDA CITY HATCHBACK Tahun 2023, HASIL SENDIRI
Rp. 350.000.000**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 265.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 1.159.160.065**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----**Sub Total** Rp. 9.326.960.065**III. HUTANG** Rp. ----**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 9.326.960.065

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.